

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA PANTAI ANGSANA DI KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU

¹Catur Harianto*, ¹Ahmad Yunani, ¹Muhammad Riduan Syafari

¹Pascasarjana Magister Administrasi Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Corresponding author: caturharianto8484@gmail.com

ABSTRACT

Angsana Beach is one of the beaches in Tanah Bumbu that still needs to be developed for its tourism object because this beach is a relatively new tourist destination, but currently it has begun to be developed by the Tanah Bumbu regional government and is starting to be visited by many local tourists. The purpose of this study is to determine the potential of tourism development areas in the District of Angsana and the harmonization of regional strategies in developing tourism areas using the principle of Bottom Up Planning. This research method uses descriptive qualitative primary data with structured interviews with local governments, tourism awareness groups (Pokdarwis). The results showed that the Angsana Beach Development which was carried out based on the concept of bottom up development or development from the bottom up, was still ineffective because what had been planned had not been realized evenly, because not all of the development programs that had been implemented were going well. The goal of bottom up development at Angsana Beach is to accelerate the coastal development process. Regional planning should be carried out in a participatory manner and come from below (bottom up planning), that is, starting from the village. In addition, local governments need to design appropriate marketing communications in order to produce regional planning that is appropriate to the local context as well as a participatory regional development planning process that departs from the village.

Keyword: *Development Strategy, Marketing Communication, BottomUpPlanning, Ecotourism, Angsana Beach, Pokdarwis.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata itu sendiri mempunyai pengaruh yang kuat bagi perkembangan wilayah di daerah sekitar obyek wisata, karena dapat bertindak sebagai industri sektor utama yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar bisa bersaing dengan daerah lain terutama bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya khususnya yang berada di lokasi destinasi wisata tersebut.

Dalam membangun destinasi wisata ini diperlukan strategi yang mampu mempercepat perkembangan wisata di lokasi obyek wisata itu. Menurut Rangkuti (2005), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Yoeti (1996), pengertian strategi harus dibedakan dengan pengertian taktik. Strategi diperlukan agar suatu perencanaan dapat dilaksanakan secara praktis dan sedetail mungkin, maka didalamnya harus mencakup pertimbangan dan penyesuaian terhadap reaksi-reaksi orang dan pihak yang dipengaruhi, dalam hal demikian diperlukan suatu strategi yang dapat membantu perencanaan yang telah dibuat.

Konsep Perencanaan pembangunan yang dilakukan dari atas ke bawah (Top Down) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di "bawah" adalah penjabaran rencana induk yang berada di "atas". Pendekatan perencanaan sektoral acap kali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama karena masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.

Pendekatan top-down planning, adalah pendekatan pembangunan dimana penentuan keputusan tidak menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi hanya mementingkan keputusan bagian tertentu dalam kelompok. Top-down planning merupakan model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top-down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja.

Salah satu proses atau rencana perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat Bottom Up. Bottom Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam pengertian dibidang pemerintahan, bottom up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan.

Pendekatan perencanaan pembangunan Bottom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, bottom-up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Dalam konteks pembangunan jasa wisata, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, salah satunya adalah Pantai Angsana. Letaknya yang strategis dan tidak jauh dari pusat ibu kota kecamatan merupakan kekuatan yang dimiliki selain indahnya panorama alam dan laut, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadikan Pantai Angsana sebagai kawasan wisata yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 3 (tiga) fokus bentuk wisata yang akan dibangun di kawasan Pantai Angsana yaitu : wisata pantai, wisata terumbu karang dan wisata mangrove. Pembangunan wisata ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu, Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Untuk pembangunan kawasan wisata Pantai Angsana menjadi wisata unggulan dan favorit, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu fokus dalam pembangunannya. Beberapa sarana dan

prasarana serta fasilitas pendukung telah dibangun di kawasan pantai Angsana diantaranya yaitu Pendopo Pantai Angsana, tempat parkir, pengaspalan jalan, loket karcis dan lain-lain. Pemerintah Desa Angsana sendiri juga telah membangun sarana dan prasarana diantaranya gazebo, alat permainan, siring jalan dan lain-lain. Masih banyak lagi sarana dan prasarana, serta fasilitas yang perlu dibangun dalam rangka menjadikan kawasan wisata pantai Angsana menjadi wisata unggulan dan favorit yang digandrungi baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara nantinya.

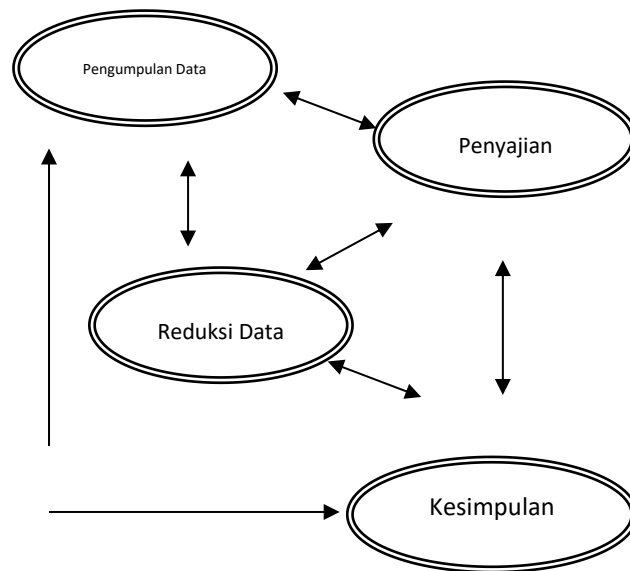
Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan Kawasan Pantai Angsana adalah perencanaan yang belum terpadu antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Desa Angsana. Selain itu juga masih kurangnya pengembangan potensi di kawasan wisata ini diantaranya yaitu dari segi sarana dan prasarana maupun cara pengelolaan kawasan wisata Pantai Angsana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pengembangan potensi daerah pariwisata melalui pendekatan bottom up planning dan apa faktor pendukung dan kendala dalam strategi pemasaran dan pengembangan potensi daerah pariwisata di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu? Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan mendeskripsikan potensi daerah pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala strategi pengembangan pengembangan potensi daerah pariwisata melalui pendekatan bottom up planning di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan paradigma interpretative dengan sudut pandang fenomenologis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti dalam hal ini dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari data dalam penelitian, hal tersebut dilakukan untuk menjaga keobjektifan data analisis (Kriyantono, 2008).

Lokasi penelitian dipilih karena wisata pantai Angsana merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik karena keindahan wisata pantai dan terumbu karangnya, sehingga hal ini menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu maupun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bahkan luar pulau kalimantan untuk mengunjungi obyek wisata pantai Angsana ini.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah berupa wawancara dan observasi kepada informan peneliti yang mengetahui tentang pembangunan mencakup Desa Angsana, kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu serta lembaga pendukung dalam pembangunan pariwisata seperti dinas pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Angsana. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan Analisis Interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

(Miles dan Huberman (2018:15-19))

Penelitian ini menggunakan Triangulasi metode yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, serta membandingkan hasil suatu dokumentasi dengan hasil observasi (Sugiyono, 2016).

PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan desa dari sumberdaya alam dan potensi daerah mengacu kepada Pasal 7 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2018-2024, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. Disamping itu, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa hingga kota. Sehingga dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Angsana Kecamatan Angsana yakni sebagai berikut:

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa dan kesejahteraan Perangkat Desa.
- 2) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lainnya di tingkat desa.
- 3) Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
- 4) Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- 5) Memfasilitasi kerjasama antar desa

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar peningkatan pelayanan masyarakat dalam pembangunan dan rehab gedung fasilitas kantor Desa Angsana
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (Jalan Usaha Tani, Jalan Desa, Jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, Drainase, TPT)
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).
- 4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa kios Desa, lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan.
- 5) Mengembangkan wajah desa dengan membangun infrastruktur taman desa dan lapangan olahraga
- 6) Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa

c. Pembinaan Kemasyarakatan:

- 1) Meningkatkan SDM masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Desa, PKK Desa, dan LINMAS Desa
- 2) Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- 3) Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat, dana bantuan/bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan sebagainya)
- 2) Meningkatkan kesehatan masyarakat
- 3) Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan (dari sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan)
- 4) Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, peningkatan produktivitas,
- 5) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan
- 6) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi.

- 7) Mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Secara lebih terinci program pembangunan desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah pembangunan desa di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Komunikasi Pemasaran Desa

Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu saling kerjasama antar bidang terutama bidang pemasaran dan ekonomi kreatif untuk lebih meningkatkan promosi tersebut dan selalu mengikuti event-event seperti pameran / expo baik yang dilakukan di dalam daerah maupun luar daerah. Selain itu Protokol Desa dan Kecamatan di Desa Angsana melakukan promosi menggunakan direct marketing (Sosialisasi dan Pemasaran Langsung kepada Masyarakat) dalam rangka pembangunan kawasan wisata Pantai Angsana. Bentuk pemasarannya yakni Dengan menyampaikan secara langsung melalui pertemuan, musyawarah dan spanduk / baliho. Pemasaran dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bisa mengadakan event-event bisa mendatangkan wisatawan, harus ditingkatkan. Namun terdapat masalah telekomunikasi karena jaringan yang ada di daerah sini cukup sulit.

Realisasi kegiatan pada setiap bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan harus terperinci meliputi volume, manfaat serta sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya ataupun sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, antara lain adalah:

- a. Dana Desa (DD) dari APBN,
- b. APBD Provinsi, Dana Aspirasi
- c. Program dari OPD Kabupaten (APBD Kabupaten), Dana Aspirasi,
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten,
- e. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- f. Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten
- g. Dana lain-lain yang syah

Program Pembangunan Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan bunyi dari Pasal 8 yang terkandung dalam RPJMDes dalam rangka program pembangunan Desa Angsana dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2019-2025, yaitu masyarakat Desa Angsana Gawir Bersama. Penjabaran dari visi dan Misi pemerintah Desa Angsana tersebut dituangkan dalam program pembangunan desa selama enam tahun kedepan dan terbagi menjadi 5 (lima) bidang yakni :

A. Bidang Pemerintahan

Program pembangunan bidang pemerintahan meliputi :

- 1) Kelengkapan Peralatan Kantor, Peralatan Rumah tangga dan Operasional Administrasi Desa
- 2) Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 3) Kesejahteraan dan operasional BPD
- 4) Operasional Lembaga Masyarakat Desa
- 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- 6) Penertiban dan Akurasi data
- 7) Penyusunan Administrasi Desa
- 8) Penyelenggaraan Administrasi Desa
- 9) Pengelolaan Administrasi

10) Penetapan/pemetaan Batas Desa/Dusun

11) Hal lainnya yang terkait dan sesuai dengan pembangunan desa di bidang pemerintahan

B. Bidang Pembangunan

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Pembangunan dan rehap Gedung Kantor Desa/Pembangunan pasilitas umum
- 2) Pembangunan Lapangan Desa
- 3) Pembangunan jalan Desa
- 4) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Desa
- 5) Pembangunan Jembatan
- 6) Pembangunan Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
- 7) Pembangunan Fasilitas Pendidikan
- 8) Pembangunan Kesehatan Masyarakat
- 9) Pembangunan Sarana Keamanan Masyarakat
- 10) Tata ruang Desa dan Pembangunan Infrastruktur
- 11) Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Objek wisata

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Pembinaan Lembaga Desa
- 2) Pembinaan Keagamaan
- 3) Peringatan Hari-hari Besar
- 4) Pendataan KK Miskin, Warga Putus Sekolah, dan Warga Buta Huruf
- 5) Peningkatan Keamanan dan wawasan kebangsaan Masyarakat
- 6) Kepedulian peningkatan kesehatan,
- 7) Pembinaan Kelompok Kesenian
- 8) Pembinaan Pendidikan
- 9) Pembinaan Kepemudaan olahraga
- 10) Pembinaan Keluarga sejahtera
- 11) Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- 12) Pembinaan kelompok usaha Ekonomi

D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Peningkatan Kapasitas Perangkat desa dan lembaga Desa
- 2) Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Tani, Ternak, Nelayan dan Perikanan , klompok usaha kecil
- 3) Peningkatan Kesejahteraan Kepemudaan olahraga
- 4) Peningkatan Kegotong royongan Kemsarakatan
- 5) peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 6) peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan
- 7) Peningkatan kelompok Kesenian
- 8) Peningkatan keamanan Masyarakat
- 9) Komunikasi Pemasran dan Kesejahteraan masyarakat Desa Angsana

E. Bidang Kebencanaan

Program pembangunan bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Kegiatan yang menyangkut Bencana alam (baik mulai dari pendataan, evakuasi, logistic, dan sebagainya yang menyangkut bencana alam dan non bencana alam)
- 2) Terkait perkembangan dan pembangunan fasilitas desa dalam penanganan bencana di desa angšana

Dari Program Pembangunan Desa Angsana yang diungkapkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa arah pembangunan desa angšana memang difokuskan kepada perkembangan di bidang ekowisata sehingga peran pemerintah desa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah serta lembaga masyarakat seperti kelompok sadar lingkungan (Pokdarwis) sangatlah penting demi kemajuan desa serta substansi yang dilakukan harus sesuai dengan rancangan awal.

Isu dan Masalah Utama dalam Pembangunan kawasan wisata di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu kewilayahan berdasarkan 10 Kecamatan sebagai wilayah kerja koordinasi pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan sudut pandang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur, adalah sebagai berikut:

Aspek Geografis dan Tanah, Aspek Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pendidikan, Aspek Pariwisata, serta Isu Strategis Pembangunan di Desa Angsana, Kecamatan Angsana. Dalam 4 aspek tersebut yang paling diutamakan adalah aspek pariwisata karena Isu Strategis Urusan Pilihan Pariwisata yang peneliti dapatkan dilapangan terutama untuk kawasan Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan, adalah:

- 1) Destinasi wisata belum memiliki daya tarik wisata yang disebabkan masih terbatasnya kompetensi masyarakat pengelolaan pariwisata, sarana dan prasarana serta konten yang dilaksanakan belum teragenda dengan baik.
- 2) Kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh masih rendahnya keterlibatan multisektor mulai dari tata ruang, konstruksi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urudan pilihan pariwisata adalah:
 - a. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum berkembang optimal;
 - b. Potensi wisata belum dikembangkan dan dikelola secara optimal;
 - c. Pembangunan Pariwisata masih belum melibatkan multisektor sesuai kebutuhan destinasi;
 - d. Masih rendahnya partisipasi dan kreatifitas masyarakat untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah;
 - e. Masih rendahnya Kapasitas layanan serta kemitraan terhadap semua stake holder Pembangunan Kepariwisata dan usaha Kepariwisata, baik didalam maupun diluar Kabupaten Tanah Bumbu;
 - f. Minat Investor dibidang Pariwisata masih rendah.

Perencanaan Pembangunan Pantai Angsana di Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Laut

Pelaksanaan perencanaan pembangunan (*bottom-up planning*) Desa Wisata Angsana di Pantai Angsana pada penelitian ini hanya diambil dari Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Wisata Angsana terdiri dari 6 tahap sesuai dengan teori milik Blakely dalam Mudrajat Kuncoro (2002:48) yang terbagi menjadi sebagai berikut:

- Pertama, pengumpulan dan analisis data. Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi penentuan basis ekonomi masyarakat Angsana, melihat peluang dan kendala, dan menentukan kapasitas kelembagaan. Sedangkan untuk menyusun kebutuhan tenaga kerja baru sebatas bayangan dan perkiraan saja.
- Kedua, pemilihan strategi pembangunan. Semua kegiatan sudah dilakukan seperti menentukan tujuan dari pembangunan desa wisata, menyusun strategi dan target pembangunan desa wisata.

- Ketiga, pemilihan proyek-proyek pembangunan. Terdiri dari 2 kegiatan, dimana kegiatan mengidentifikasi proyek sudah dilakukan namun belum melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek pembangunan desa wisata di Pantai Angsana.
- Keempat, pembuatan rencana tindakan. Tahap ini terdiri dari menentukan dan mengembangkan input yang menjadi masukan untuk proses pembangunan desa wisata, tahap ini sudah dilakukan namun hanya sebatas menentukan inputnya saja. Kegiatan selanjutnya perencana telah membuat alternatif sumber pembiayaan dan mengidentifikasi struktur pembangunan desa wisata dengan membuat rincian seperti paket kegiatan wisata dan rincian harga setiap paket wisata.
- Kelima, Penentuan rincian proyek. Pada tahap ini perencana telah membuat rencana bisnis dan pengembangan desa wisata yang dikelola dengan sistem satu pintu. Kemudian kegiatan studi kelayakan secara rinci direncanakan kemudian diadakan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan jika kegiatan desa wisata sudah berjalan.
- Keenam, persiapan rencana secara keseluruhan. Pada tahap ini perencana telah menyiapkan jadwal implementasi desa wisata mulai dari soft opening sampai grand opening. Kemudian perencana telah menyusun perencanaan secara keseluruhan melalui DED (Detail Engineering Design).

Keberhasilan sebuah pembangunan tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa wisata ini nantinya akan terbagi menjadi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan, terdiri dari sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, kemitraan dan kerjasama, dan partisipasi masyarakat.

Temuan lapangan didapat peneliti sesuai dengan acuan pada teori tentang Perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (Bottom-up Planning) dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dimana masyarakat desa diberi kesempatan dan keluasaan untuk membuat perencanaan pembangunan dan merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa (Alisyahbana, 2003: 98).

Suryono, (2001: 32) mengatakan konsep pembangunan dari bawah ke atas (Bottom-up) dapat terwujud, harus mengembangkan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip di tingkat desa, yaitu membudayakan warga desa memikirkan desanya dan pembangunan desanya, dapat dilakukan melalui
 - a. Perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan desa.
 - b. Pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Prinsip di tingkat kecamatan dapat dilakukan melalui:
 - a. Inventarisasi hal-hal positif yang dirasakan.
 - b. Pendalaman atau penambahan daftar masalah yang dihadapi setelah memahami hal yang positif.
 - c. Penentuan tindakan dan aktor pelaksana penanganan masalah.
 - d. Penetapan prioritas sendiri.
3. Prinsip di tingkat kabupaten dapat dilakukan melalui:
 - a. Seluruh peserta mendengarkan presentasi usulan dari masyarakat.
 - b. Masyarakat mendengarkan dan mengkritisi program setiap Dinas yang dipresentasikan apa tujuan dan manfaatnya dalam pembangunan daerah pantai angšana tersebut.
4. Merumuskan tindakan untuk penanganan tiap usulan masyarakat dapat dilakukan melalui usulan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat, usulan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, dan usulan yang akan ditangani oleh pemerintah.

5. Perencanaan Pembangunan Bottom-up

Perencanaan dari bawah keatas (Bottom-up) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas (Bottom-up) prosesnya dimulai dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat, secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.

Indikator Pembangunan Desa Angsana dengan Perencanaan Bottom Up Planning

Dari hasil penelitian, peneliti melihat bahwa desa angšana dapat menggunakan Model Desa Konservasi yakni merupakan bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma dari top down ke bottom up. Peran partisipatif masyarakat merupakan modal utama dalam penyusunan perencanaan dalam rangka pemberdayaan. Karenanya model Desa Konservasi menurut Tarigan (2004) sudah mengedepankan aspek konservasi, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta akan menjadi contoh dalam pemberdayaan di sekitar kawasan konservasi. Proses perencanaan pemberdayaan masyarakat di Pantai Angšana di Desa Angšana pendekatan yang digunakan adalah top down planning dan juga menggunakan pendekatan bottom up planning. Tarigan (2004) menyampaikan bahwa pada bottom up planning, institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.

Proses perencanaan yang aliran dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan menurut Wahyudi (2006) adalah proses perencanaan bottom up dan top down. Proses perencanaan RPTN dan Renstra telah berjalan dengan baik dengan indikasi antara lain penyusunannya sudah diupayakan dengan partisipatif dan kolaboratif. Visi, Misi serta program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen tersebut relative baik dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat di Desa Angšana. Terjadi sinergitas antara proses perencanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pantai Angšana dengan Musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah serta pemerintah desa walaupun terasa belum optimal karena Desa Angšana masih dalam tahap perencanaan pembangunan Desa Konservasi seperti desa-desa yang telah berkembang di pulau Jawa.

Adanya sinergitas antara proses perencanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Angšana dengan Musrenbang yang dilakukan pemerintah daerah, walaupun belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses partisipatif sudah mulai berjalan selain pihak Desa Angšana juga berusaha melalui pembangunan Resort yang aktif serta melakukan identifikasi potensi melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di lapangan untuk merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) inilah yang menurut Wahyudi (2006) merupakan proses perencanaan pembangunan partisipatif. Sinergitas stakeholder dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004) pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh berbagai komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga seluruh aspek pemerintah dan lembaga dalam hal ini sebagai indikator penting pembangunan sebuah kawasan wisata yang berkembang pada nantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Pantai Angšana yang dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan bottom up atau pembangunan dari bawah ke atas, sudah terlaksana dengan baik dan efektif karena apa telah direncanakan oleh kedua pihak telah terealisasi secara merata. Program-program pembangunan yang direncanakan serta dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Adapun tujuan pembangunan bottom up di Pantai Angšana adalah mempercepat proses pembangunan Pantai. Adapun aspek pembangunan bottom up di Pantai Angšana

yang telah dirumuskan dalam program pembangunan, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan adalah pembangunan fisik dan non fisik di antaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana Pantai, seperti jalan setapak, jembatan, perumahan dan sebagainya, sudah cukup maksimal pelaksanaannya.

Selain itu Pemasaran dari pemerintah kabupaten bisa mengadakan event-event bisa mendatangkan wisatawan, harus ditingkatkan. masalah telekomunikasi dan jaringan yang sulit dijangkau. Kelemahan dari pantai angkana, untuk fasilitas MCK fasilitas pemerintah desa, tidak bisa mendatangkan PAD, pengelola yang kurang memadai, pokdarwis bisa membina pengelola mck untuk perawatan. Disisi lain Kepala Desa Angkana perlu membuat skala prioritas yang diunggulkan di pembangunan wisata, dalam perencanaan pembangunan desa perlu program prioritas jangka menengah direncanakan di pembangunan wisata, di prioritas pertama dan kedua diluar dari agenda pembangunan yang rutin. Dispora juga harus bisa lebih fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, seperti membuat shelter dan pendopo tidak melihat situasi dan kondisi di pantai, tetapi harus dipertimbangkan kualitas terutama *quality control* yang bisa mengkomodifikasi fasilitas pantai dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anwar. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta.
- Alisyahbana, 2003. *Pembangunan dari tingkat bawah ke atas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2009, *Manajemen Penelitian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harsono, 2002. *Penerapan dan Implementasi Pembangunan di Tingkat Daerah*. Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Iqbal, Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartasmita, 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Korten, 2001. *Administrasi Pembangunan Desa*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kriyantono, R. (2008). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- M. Puteh, Jakfar. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Grafindo Litera Media. Jakarta.
- Miller, 2001. *Proses Terbentuknya Implementasi*. Penebar Swadaya Agromedia Pustaka Yogyakarta.
- Moeleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh, Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nasution, Zulkarimen, 2008. *Komunikasi Pembangunan : Pengenalan teori dan penerapannya*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

- Tangkilisan, 2010. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Tjokroamidjojo, 2001. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Todoro, Michael, P. 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, Erlangga, Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 2000. *Administrasi pembangunan, Gunung Agung*, Jakarta.
- Sukirno, S. 2007. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Perpustakaan Nasional. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Suryono, Agus. 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Malang Press, Malang.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Ed. Pertama. Cet. Kedua. Kencana. Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Sukandarrumidi. 2008. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Gadjah Mada University press.
- Solihin, Muhammad Amir, 2005. *Top Down – Bottom Up Planning Sebagai Alternatif Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah Hinterland Secara Partisipatif (Kasus Studi Desa Cipelah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung)*, Jurnal Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
- Rogers, 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ritzer, 2010. *Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta: Pustaka Pulsar.
- Rangkuti F. 2005. *Marketing Analysis Made Easy*. Gramedia Pustaka Utaman. Jakarta.
- Rangkuti F. 2014. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*. Gramedia Pustaka Utaman.
- Santoso B dan Tangkilisan HN. 2004. *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata*. Yogyakarta. Penerbit YPAPI.
- Samad N. 2014. Makalah: *Teknik Pelayanan Wisatawan: Pengenalan Karakteristik Wisatawan*. Jakarta.
- Samsuridjal dan Kaelany Hd. 1999. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya.
- Singarimbun M. 2011. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES. 265 halaman. Soedjono. 1990. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata*. Jakarta. Gramedia.
- Spillance J. 1987. *Ekonomi Pariwisata*. Yagyakarta. Kanisius. 157 halaman. Subagyo. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Liquidity* (1:2). 25-45.

Rangkuti, Freddy. (1996). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung

Suwantoro, Gamal, (1997). *Dasar-dasar Pariwisata*, Yogyakarta: ANDY